ABSTRAK

Sabrina Lisanika Azzahra (2025), NIM 1213040123 : penelitian ini berjudul “*TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PROSTITUSI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 DAN KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2014*”

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena prostitusi merupakan persoalan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat perkotaan Indonesia, termasuk di Kota Tangerang dan Kota Jambi. Praktik ini tidak hanya merusak moral dan nilai-nilai sosial, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta melanggar norma agama. Sebagai respons atas keresahan tersebut, masing-masing daerah menerbitkan peraturan daerah guna memberikan sanksi kepada pelaku prostitusi. Namun, efektivitas serta keadilan dari sanksi tersebut perlu dikaji ulang, terutama dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini memiliki 3 tujuan yaitu; 1) Untuk mengetahui terkait sanksi dan mekanisme pelaku prostitusi dalam Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014. 2) Untuk mengetahui terkait prinsip-prinsip dalam peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014. 3) Untuk mengetahui Tinjauan Siyasa Syari’iyah terhadap prinsip-prinsip penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyasa syari’iyah*, yaitu untuk di tinjau *siyasa syari’iyah* terhadap sanksi tindak pidana pelaku prostitusi terhadap perda kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan perda kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis deskriptif terhadap dokumen peraturan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Jambi lebih komprehensif karena mencakup larangan terhadap pelaku, pengguna jasa, dan fasilitator prostitusi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas. Sebaliknya, Perda Kota Tangerang dinilai kurang menyentuh pengguna jasa dan aspek rehabilitasi. Dalam konteks *siyasa syari’iyah*, Perda Jambi lebih mendekati prinsip kemaslahatan dan